

**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN
OLEH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**NICO LUBIS
012022559.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NICO LUBIS
NIM : 012022559.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN
KEHILANGAN OLEH KEPOLISIAN RESOR
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR



Palembang, Desember 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. H. Firman Freddy Busroh, SH, M.Hum, CTL

Dra. Hj. ERLeni, SH, MH



**PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM
PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN OLEH
KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR**

Penulis,
NICO LUBIS
012022559.P

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, S.H., M.Hum., C.T.L.
Pembimbing Kedua,
Dr. Hj. ERLENI, S.H., M.H.

Abstrak

Untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual aparatur organisasi secara keseluruhan perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugas mengeluarkan surat keterangan kehilangan, perlu adanya Standar Operasional Prosedur Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SOP SPKT). Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah penerapan Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan surat keterangan kehilangan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir serta bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur pembuatan surat keterangan kehilangan. Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan surat keterangan kehilangan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun walaupun masih ada oknum yang melakukan pungli. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur pembuatan surat keterangan kehilangan antara lain adalah : Faktor penegak hukum, masih kurangnya personil pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang mengakibatkan pelayanan yang kurang maksimal dan kemudian masih terdapat oknum yang melakukan pungli terhadap masyarakat yang membuat Surat Keterangan Kehilangan. Faktor sarana atau prasarana, hampir semua Polsek yang penulis teliti yang berada di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memasang papan Standar Operasional Prosedur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu hanya di Polres Ogan Komering Ilir yang memasang papan Standar Operasional Prosedur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Akibatnya, dari tidak ada Standar Operasional Prosedur pelaksana pelayanan memiliki peluang untuk melakukan pungli.

Kata Kunci : Standar, Kepolisian, Terpadu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Standar Operasional Prosedur.....	15
B. Prinsip Pelayanan Publik.....	19
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	29
BAB III. PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEHILANGAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	
A. Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir.....	39
B. Kendala-Kendala yang Dihadapi oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir dalam Melaksanakan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Kehilangan.....	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur dalam pembuatan surat keterangan kehilangan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun walaupun masih ada oknum yang melakukan pungli.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ogan Komering Ilir dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur pembuatan surat keterangan kehilangan antara lain adalah :
 - a. Faktor Penegak Hukum : masih kurangnya personil pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang mengakibatkan pelayanan yang kurang maksimal dan kemudian masih terdapat oknum yang melakukan pungli terhadap masyarakat yang membuat Surat Keterangan Kehilangan.
 - b. Faktor Sarana atau Prasarana : hampir semua Polsek yang penulis teliti yang berada di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir belum memasang papan Standar Operasional Prosedur Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu hanya di Polres Ogan Komering Ilir

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Arikunto S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Arini T. Soemohadiwidjojo, *Mudah Menyusun Standard Operating Procedure (SOP)*, Perum Bukit Permai, Jakarta, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Budihardjo, *Paduan Praktis Menyusun SOP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.
- B. Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Ferliana Harman, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*. Gava Media, Jakarta, 2011.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo-Persada, Jakarta, 2004.
- J. Efendi & Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Lijan Poltak Sinambela, dkk, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT Bumi Askara, Jakarta, 2007.
- Koentjoro Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Puadi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Lasbang Grafika., Surabaya, 2014.
- _____, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rusda Irawati, Enstien Basuki Woro Hardiastuti, *Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) Proses Pembelian Bahan Baku, Proses Produksi dan Pengemasan pada Industri Jasa Boga*, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Volume 4 Nomor 2 Desember 2016.